Otoritas Bandara Investigasi Batik Air Tabrak Garbarata

BALI (IM) – Peswat Batik Air ID 6506 rute Jakarta-Bali menabrak garbarata di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Sabtu (22/5) sekitar pukul 09.30 WITA. Pesawat sudah berhenti, tetapi tiba - tiba bergerak maju ke depan.

Akibat pesawat yang bergerak maju sendiri tersebut, menabrak Garbarata. Akibatnya, mesin pesawat sebelah kiri bagian atas robek.

Setelah kejadian ini, Garbarata tetap dapat beroperasi normal. Begitu juga aktivitas di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, tidak terjadi ganggung dari dampak insiden tersebut.

Selanjutnya, Otoritas Bandara Wilayah IV melakukan investigasi lanjutan dengan membawa bukti awal.

Setelah dilakukan pemindahan pesawat, Otoritas Bandara Wilayah IV langsung melakukan investigasi lanjutan dengan membawa bukti awal. ● **osm**

Maksi Petugas Saat Razia Masker di Solo Dijerat Pasal Berlapis

SOLO (IM) - Pria berinisial H yang memukul dan memaki petugas saat operasi yustisi di Jalan Kyai Mojo, Semanggi, Pasar Kliwon,Solo, Jawa Tengah dijerat dengan pasal berlapis.

"Proses hukum tuntas untuk pertanggungjawabannya," tegas Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Minggu (23/5).

Saat ini H masih diperiksa di Mapolresta Solo. Ade menambahkan, H akan dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap petugas.

"Kita jerat yang bersangkutan dengan pasal berlapis ada pasal penganiayaan berat sebagaimana pasal 351 KUHP," urainya.

Selain itu, H juga dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang ancaman kekerasan dan kekerasan fisik. Hal ini sebagaimana tindakan H yang sempat memukul petugas yang melakukan razia.

"Ada pasal ancaman kekerasan dan ada kekerasan fisik sebagaimana pasal 335 KUHP," ucap Ade.

Kemudian, H juga bisa dijerat dengan pasal 212 KUHP dengan ancaman kekerasan dan kekerasan melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah. "Saat ini tim penyidik sedang bekerja," pungkas Ade.

Diberitakan sebelumnya, H menyerang salah seorang anggota Satlantas Solo ketika terjaring operasi yustisi karena tak memakai masker di Jalan Kyai Mojo, Pasar Kliwon, Minggu (23/5) pagi.

Saat terjaring, H memukul kepala sebelah kiri salah seorang petugas. Tidak hanya itu, H juga sempat mengeluarkan kata-kata kotor dan memaki petugas.

H lalu diangkut menggunakan truk patroli ke Mapolresta Solo untuk penindakan lebih lanjut. Tidak hanya itu, petugas juga akan menelusuri mengenai dokumen kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Mengingat saat diamankan, ternyata H tidak membawa dokumen kelengkapan kendaraannya. ● **mei**

Data WNI Diduga Bocor, Cak Imin Dorong Penuntasan RUU PDP

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendorong penuntasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Hal ini terkait maraknya kasus kebocoran data yang terjadi, termasuk dugaan kebocoran data WNI yang diduga data peserta BPJS Kesehatan.

Pria yang akrab disapa Cak Imin mengaku khawatir jika semua data-data tersebut disalahgunakan untuk tindak kejahatan keuangan, rekayasa sosial, sampai niatan politik.

Melalui RUU PDP, Cak Imin berharap, berbagai kejahatan terkait pencurian dan peretasan data dapat diantisipasi dan masyarakat dapat terlindungi dalam menjaga kerahasiaan data pribadi.

"Rahasia-rahasia atau dokumen penting dengan mudah bisa di akses oleh sekelompok orang. Ini sangat berbahaya, ini menyangkut peran strategis bagaimana negara melindungi masyarakat dan rahasia negara," kata Cak Imin dalam keterangan tulis, Minggu (23/5).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa data merupakan alat yang sangat ampuh dewasa ini untuk menjadi senjata mendominasi dan menguasai. Karena itu, dia menambahkan, penting sekali pemerintah benar-benar menjaga kedaulatan data Bangsa Indonesia.

"Sekarang ini menjaga kedaulatan negara hakikatnya bukan hanya menjaga setiap jengkal tanah di NKRI dari intervensi asing. Kedaulatan data menjadi faktor krusial untuk dilindungi dari pihak-pihak jahat," lanjutnya.

Diketahui, kasus kebocoran data yang baru-baru ini terjadi identik dengan data kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Indikator seperti kode-kode nomor kartu (noka), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran menunjukkan kecenderungan tersebut.

Adapun kebocoran data pribadi bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya data kelolaan marketplace lokal juga mengalami hal serupa. Bahkan data pemilihan umum tahun 2014 juga sempat diretas dan beredar di dunia maya. ● **han**

IDN/ANTARA

PELEPASAN PASUKAN YONIF 315/GARUDA KE PAPUA

Sejumlah prajurit Yonif 315/Garuda mengikuti upacara pelepasan Satuan Tugas Pam Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) Papua di Lapangan Yonif 315/Garuda, Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/5). Sebanyak 400 prajurit Yonif 315/Garuda tersebut akan bertugas selama sembilan bulan untuk memperkuat pasukan TNI dan Polri yang sudah lebih dulu bertugas menjaga pertahanan dan keamanan di Papua.

75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tak Perlu Diragukan Lagi soal Wawasan Kebangsaannya

Jika perintah Presiden Jokowi dilakukan KPK dengan tidak memecat 75 pegawai KPK yang tak lolos KWK , harus dipastikan bahwa posisi mereka tidak diubah.

JAKARTA (IM) – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Saut Situmorang mengatakan, dirinya sudah melihat portofolio 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Sebab itu, ia menegaskan, mereka tak perlu diragukan wawasan kebangsaannya.

"75 orang ini sudah memiliki portofolio yang tidak perlu diragukan lagi wawasan kebangsaannya, profesionalitasnya dan integritasnya," kata Saut dalam diskusi secara virtual bertajuk "Menakar Polemik TWK Pasca Pidato Presiden Jokowi", Minggu (23/5).

Saut mengatakan, pihak yang menentukan lolos atau tidaknya pegawai KPK tersebut harus melihat portofolio para pegawai sehingga dapat menilai integritas dan catatan mereka selama bekerja di KPK.

Ia mengatakan, jika hal tersebut sudah dilakukan, maka persoalan terkait 75 pegawai KPK tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

"Itu bisa kita selesaikan dengan baik karena kita bicara keadilan di situ. Kita bicara kejujuran di situ. Jadi sekali lagi tolong dilihat portofolio satu persatu orang-orang itu yang tidak lulus itu," ujarnya.

Di samping itu, Saut menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan jika ada kekurangan dari pegawai KPK tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan. Saut mempertanyakan siapa pihak yang menilai kekurangan 75 orang pegawai KPK dan bagaimana transparansi dari penilaian TWK tersebut.

"Seperti apa transparansi menilai kekurangan itu? Karena kan kita bicara menakar, kita bisa juga bicara nanti apa yang kita sebut sebagai kecurigaan kita terhadap prosesnya dari awal, karena kalau kita lihat proses yang mulai dari undang-undang KPK, itu ke luar sampai hari ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Saut mengatakan, jika perintah Presiden Jokowi dilakukan KPK dengan tidak membebastugaskan 75 pegawai tersebut harus dipastikan posisi para pegawai tidak diubah. "Jangan-jangan diterima tapi jadi ngurus-ngurus ini yang tidak relevan dengan pekerjaannya sehingga mereka tidak perform, dikondisikan untuk kemudian mereka lemah, kemudian mereka ke luar," katanya.

Upaya Tak Taat Hukum

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang angkat suara terkait polemik 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui, Jokowi sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa proses alih status personel KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

Sigit mengatakan, dalam konteks tersebut, terlihat ada upaya untuk tidak menaati aturan perundang-undangan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, sehingga Presiden Jokowi bersuara.

"Ketika diletakkan dalam konteks seperti itu, menunjukkan adanya upaya untuk tidak menaati hukum, karena hukumnya mengatakan itu harus dialih statuskan tapi yang dilakukan tidak menaati ketentuan hukum," kata Sigit dalam diskusi secara virtual bertajuk "Menakar Polemik TWK Pasca Pidato Presiden Jokowi", Minggu (23/5).

Sigit menilai, polemik 75 orang pegawai KPK tersebut dikhawatirkan adanya upaya obstruction of justice atau menghambat penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi dengan menyingkirkan mereka yang menjadi bagian dari proses penegakan hukum.

"Jadi menurut saya ada persoalan dengan itikad baik ada persoalan dengan kepatuhan terhadap undang-undang yang selama ini dijadikan jargon, lalu ada persoalan yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya obstruction of justice," ujarnya.

KPK sebelumnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri, yang menyebut 75 pegawai KPK resmi dibebastugaskan. Akibatnya, banyak pihak memberikan kritik terhadap proses TWK dan kehadiran SK tersebut. Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai. ● **han**

Azis Syamsuddin Diminta Tak Mangkir Lagi pada Pemanggilan Kedua Penyidik KPK

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diminta untuk hadir dalam pemanggilan kedua yang rencananya akan segera dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui pada pemanggilan pertama pada 7 Mei 2021 lalu, politisi Partai Golkar itu mangkir.

Azis diperiksa sebagai saksi dugaan kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

"Untuk Pak Azis sendiri tolonglah, dia kan Wakil Ketua (DPR) yang membidangi hukum dan pernah lama di Komisi III membidangi hukum pula. Berilah tauladan pada masyarakat untuk datang pada panggilan kedua nanti," ujar Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Minggu (23/5).

Jika merasa tidak bersalah dan terlibat, Boyamin menilai, Azis tidak perlu ragu hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK.

"Dan Pak Azis Syamsuddin tidak perlu takut kalau tidak merasa bersalah, dan nanti jelaskan semuanya dengan segala argumen, data dan bukti, bahwa Pak Azis tidak terkait dan tidak terlibat dalam perkara tersebut," ujarnya.

Boyamin menegaskan bahwa kedatangan Azis justru akan membantu proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi antara penyidik KPK dan Wali Kota Tanjungbalai.

"Sehingga kemudian (Azis Syamsuddin) justru membantu KPK membuat terang perkara bahwa yang melakukan dugaan korupsi itu orang-orang yang sudah menjadi tersangka saat ini," kata Boyamin.

Meski tidak merinci kapan akan dilakukan pemanggilan kedua, namun Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa lembaga antirasuah itu akan segera melakukan pemanggilan kembali pada Azis. "Untuk kepentingan penyidikan, tentu ada strategi penyidikan yang kami lakukan. Kami pastikan penyidik akan memanggil ulang saksi Azis Syamsuddin. Waktunya akan kami informasikan lebih lanjut," ungkap Ali dalam keterangannya, Kamis (20/5).

Sebelumnya Azis mengatakan alasanya tidak datang saat dipanggil KPK karena ada kegiatan.

Dalam perkara ini, Azis diduga menjadi fasilitator yang mempertemukan antara Robin dan Syahrial di rumah dinasnya, di wilayah Jakarta Selatan, Oktober 2020. Pada pertemuan itu diduga Syahrial ingin meminta bantuan agar KPK menghentikan penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Tanjungbalai 2020-2021. Setelah itu Robin bersama seorang pengacara Maskur Husain sepakat akan membantu Syahrial dengan imbalan Rp 1,5 miliar. Syahrial menyetujui permintaan itu, dan diduga telah mengirimkan uang Rp 1,3 miliar pada Robin. Uang itu kemudian dibagi oleh Robin kepada Maskur Husain sebanyak Rp 525 juta. ● **mei**

Partai Gerindra Masih Bulat Suara Ingin Prabowo Maju Capres 2024

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menegaskan, kader Partai Gerindra masih bulat suara untuk mendorong Prabowo Subianto maju di ajang pemilihan calon presiden pada 2024 nanti. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat hadir dalam konferensi pers hasil survei, Minggu (23/5).

"Kami kader Gerindra masih bulat untuk meminta Pak Prabowo maju kembali (sebagai calon presiden)," ujar Sugiono.

r Hal tersebut juga sebelumnya sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tak lama setelah kongres luar biasa (KLB) partai tersebut.

"Bahwa kami kader Gerindra masih inginkan Pak Prabowo sebagai capres dari Gerindra. Dalam KLB beliau mengatakan nanti akan dibicarakan," kata Muzani.

Sementara berdasarkan survei Puspoll Indonesia, Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tinggi sebagai capres. Dari beberapa simulasi nama capres yang ada di survei tersebut, nama Prabowo Subianto selalu menempati urutan tertinggi.

Dari simulasi 22 nama, Prabowo Subianto mendapatkan angka 20,9 persen yang merupakan urutan pertama. "Jadi dari 22 nama yang kami uji, elektabilitas tertinggi ada di nama Pak Prabowo Subianto 20,9 persen yang mengatakan akan memilih Prabowo jika pemilihan presiden digelar masa survei digelar 20-29 April 2021," kata Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja.

Dalam simulasi 11 nama, nama Prabowo Subianto juga masih ada di urutan pertama dengan 23,2 persen. Begitu pun dalam simulasi 8 nama, Prabowo Subianto mendapat 23,3 persen. Sementara dari simulasi 4 nama, ua mendapat 25,3 persen dan simulasi 3 nama mendapatkan 27,6 persen. ● **mei**

PT SURYA PERMATA ANDALAN Tbk.
(d/h PT NUSANTARA PROPERTI INTERNASIONAL Tbk.)
DAN ENTITAS ANAK

Kantor Pusat :
Jln. Sarinande No. 20, Bali - Indonesia
Telp.: (0361) 738163, Fax.: (0361) 731652
Email : admin@suryapermataandalan.co.id
Website : www.suryapermataandalan.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

ASET	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	148.026.420.500	151.550.957.000
Piutang usaha - pihak ketiga	-	505.087.263
Piutang lain-lain - pihak ketiga	164.708.795	517.232.876
Persediaan	606.870.721	741.677.102
Biaya dibayar di muka	67.650.000	153.173.799
Uang muka	16.492.690	521.772.117
Jumlah Aset Lancar	**148.882.142.706**	**153.989.900.157**
Aset Tidak Lancar		
Goodwill	71.967.355	71.967.355
Aset pajak tangguhan	1.667.347.357	1.245.266.710
Aset tetap - bersih	658.149.072.620	656.156.482.276
Jumlah Aset Tidak Lancar	**659.888.387.332**	**657.473.716.341**
JUMLAH ASET	**808.770.530.038**	**811.463.616.498**

LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha - pihak ketiga	187.130.377	457.690.766
Utang lain-lain - pihak ketiga	46.781.944	1.534.467.219
Utang pajak	807.660	810.621.938
Uang muka penjualan dan pendapatan	349.781.025	379.162.313
Biaya masih harus dibayar	477.083.586	753.451.035
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**1.061.584.592**	**3.935.393.271**
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas imbalan kerja	113.549.332	851.412.020
JUMLAH LIABILITAS	**1.175.133.924**	**4.786.805.291**
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham		
Modal dasar - 24.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.001.092.004 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 8.000.986.500 saham pada tanggal 31 Desember 2019	800.109.200.400	800.098.650.000
Tambahan modal disetor - bersih	8.736.032	7.892.000
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	1.000.000.000	500.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	6.450.893.315	6.050.190.213
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	807.568.829.747	806.656.732.213
Kepentingan non-pengendali	26.566.367	20.078.994
JUMLAH EKUITAS	**807.595.396.114**	**806.676.811.207**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**808.770.530.038**	**811.463.616.498**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	2020	2019
PENDAPATAN	1.628.481.178	17.788.407.151
BEBAN POKOK PENDAPATAN	990.343.816	4.230.399.402
LABA BRUTO	**638.137.362**	**13.558.007.749**
Beban pemasaran	(98.060.012)	(461.565.921)
Beban umum dan administrasi	(4.940.043.906)	(11.323.011.692)
Beban operasional	(782.168.518)	(2.075.176.945)
Beban keuangan	(59.785.571)	(1.051.923.416)
Pendapatan keuangan	4.793.636.003	6.487.090.591
Lainnya - bersih	933.394.470	(422.050.020)
LABA SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	**485.109.828**	**4.711.370.346**
TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - Bersih	**422.080.647**	**(1.397.209.838)**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**907.190.475**	**3.314.160.508**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	**-**	**-**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**907.190.475**	**3.314.160.508**
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	900.703.102	3.297.452.528
Kepentingan non-pengendali	6.487.373	16.707.980
Jumlah	**907.190.475**	**3.314.160.508**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	900.703.102	3.297.452.528
Kepentingan non-pengendali	6.487.373	16.707.980
Jumlah	**907.190.475**	**3.314.160.508**
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	**0,11**	**0,44**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	2.104.187.153	17.109.914.014
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lain-lain	(7.865.641.167)	(12.265.603.650)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(5.761.454.014)	4.844.310.364
Penerimaan pendapatan keuangan	5.146.160.084	5.969.857.715
Pembayaran beban keuangan	(59.785.571)	(1.051.923.416)
Penerimaan hibah pemerintah	143.152.648	-
Pembayaran pajak penghasilan	(234.600.500)	(175.406.875)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**(766.527.353)**	**9.586.837.788**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(2.769.403.579)	(44.484.520.250)
Penjualan aset tetap	-	88.354.167
Pembayaran uang muka	-	(521.772.117)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(2.769.403.579)**	**(44.917.938.200)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Setoran modal dari pelaksanaan waran	11.394.432	106.542.000
Penerimaan hasil penawaran umum perdana saham	-	206.000.000.000
Pembayaran biaya emisi saham	-	(6.000.000.000)
Pembayaran utang bank	-	(16.577.271.588)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**11.394.432**	**183.529.270.412**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(3.524.536.500)**	**148.198.170.000**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**151.550.957.000**	**3.352.787.000**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**148.026.420.500**	**151.550.957.000**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk						
			Saldo laba				
	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor - bersih	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
Saldo 1 Januari 2019	**600.000.000.000**	**-**	**-**	**3.252.737.685**	**603.252.737.685**	**3.371.014**	**603.256.108.699**
Setoran modal	200.098.650.000	6.000.000.000	-	-	206.098.650.000	-	**206.098.650.000**
Biaya emisi saham	-	(6.000.000.000)	-	-	(6.000.000.000)	-	**(6.000.000.000)**
Pelaksanaan waran	-	7.892.000	-	-	7.892.000	-	**7.892.000**
Cadangan umum	-	-	500.000.000	(500.000.000)	-	-	**-**
Jumlah laba tahun berjalan	-	-	-	3.297.452.528	3.297.452.528	16.707.980	**3.314.160.508**
Saldo 31 Desember 2019	**800.098.650.000**	**7.892.000**	**500.000.000**	**6.050.190.213**	**806.656.732.213**	**20.078.994**	**806.676.811.207**
Setoran modal	10.550.400	-	-	-	10.550.400	-	**10.550.400**
Pelaksanaan waran	-	844.032	-	-	844.032	-	**844.032**
Cadangan umum	-	-	500.000.000	(500.000.000)	-	-	**-**
Jumlah laba tahun berjalan	-	-	-	900.703.102	900.703.102	6.487.373	**907.190.475**
Saldo 31 Desember 2020	**800.109.200.400**	**8.736.032**	**1.000.000.000**	**6.450.893.315**	**807.568.829.747**	**26.566.367**	**807.595.396.114**

Catatan:

Informasi keuangan diatas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli (a member of EuraAudit International association of Independent firm) yang memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 21 Mei 2021.

Bali, 24 Mei 2021

PT. Surya Permata Andalan Tbk. dan Entitas Anak

ttd

Direksi

MAESTRO 90 Adv.